



Pemkab Serahkan LKPD Ketapang 2018 ke BPK

KETAPANG, SP - Wakil Bupati Ketapang, Suprpto S menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 ke Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar, Joko Agus Setyono, Jumat (29/3).

Penyerahan LKPD juga didampingi Asisten III Bidang Adminitrasi Umum, Heronimus Tanam, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Alexander Wilyo dan Kepala Inspektorat, Devie P Frantito yang ikut menandatangani Piagam Penguatan Pembangunan Zona Integritas bersama Joko Agus Setyono.

Kepala BPK Perwakilan Kalbar, Joko Agus Setyono mengungkapkan, dalam amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000, tentang pemeriksa pengelola dan tanggung jawab keuangan negara terkait waktu penyerahan LKPD, pemerintah daerah dapat menyampaikan LKPD 2018 dan mencanangkan Pembangunan zona integritas, menuju Wilayah

Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada BPK Perwakilan Kalbar, serta penyerahan laporan keuangan *unaudited* tahun anggaran 2018.

“Yang dimaksud zona integritas adalah pimpinan beserta jajarannya tidak melakukan korupsi dan berupaya menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara optimal,” kata Joko.

Selanjutnya penilaian daerah yang berhasil membangun WBK dan wilayah birokrasi dan melayani dilakukan Kemenpan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan melakukan survei di lapangan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ketapang, Alexander Wilyo mengatakan, setelah LKPD Ketapang diserahkan ke BPK perwakilan Kalbar, selanjut akan dilakukan audit.

“Saya berharap tahun ini laporan keuangan Ketapang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke lima. (teo/pk/jee)



PENYERAHAN LKPD – Wakil Bupati Ketapang, Suprpto S menyerahkan LKPD Ketapang 2018 kepada Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Joko Agus Setyono, Jumat (29/3).